



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG PRAMONO**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **436486**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **11.989.853.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , Rp. 1.295.805.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 372 m2/272 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.472.930.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 22 m2/22 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 565.800.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/18 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 255.318.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **875.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA VOXY MPV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOBIL, MAZDA SEDAN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 347.000.000



4. MOBIL, WULING REV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
235.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 6.902.611.400

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.212.386.592

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 21.429.850.992

III. HUTANG Rp. 2.239.194.988

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 19.190.656.004

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.